

STATISTIK KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2019



STATISTIK KEMISKINAN
PROVINSI SULAWESI BARAT 2019



STATISTIK KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2019

ISSN: 2655-0326

Nomor Publikasi: 76520.2003

Katalog: 3205025.76

Ukuran Buku: 17,5 x 25 cm

Jumlah Halaman: x + 46 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Barat

Penyunting:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Barat

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
BPS Provinsi Sulawesi Barat

Diterbitkan Oleh:

© BPS Provinsi Sulawesi Barat

Dicetak Oleh:

CV. Mitra Karya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

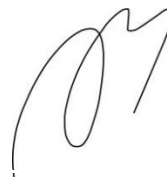
Publikasi Statistik Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 merupakan publikasi yang memberikan gambaran kemiskinan dan karakteristiknya. Publikasi ini akan secara rutin diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat.

Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah perkembangan tingkat kemiskinan provinsi, perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten dan perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Sulawesi.

Penerbitan publikasi ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan para konsumen data khususnya pemangku kepentingan. Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian publikasi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi ini dimasa mendatang.

Mamuju, September 2020

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Barat



M. La'bi, S.Si., M.M.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	2
1.3. Sumber Data	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
1.5. Konsep dan Definisi	3
1.6. Metode Penghitungan Kemiskinan	5
BAB II PERSPEKTIF KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015-2019	9
2.1. Garis Kemiskinan	9
2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	11
2.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan	13
2.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan	15
BAB III PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015-2019	17
3.1. Garis Kemiskinan Kabupaten	17
3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten	18
3.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten	20
3.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten	21
BAB IV PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI DI PULAU SULAWESI TAHUN 2015-2019	23
4.1. Garis Kemiskinan Provinsi di Sulawesi	23
4.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Sulawesi ..	24
4.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Sulawesi	26
4.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi di Sulawesi	27

BAB V	PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019.....	29
5.1.	Karakteristik Sosial Demografi.....	29
5.2.	Karakteristik Pendidikan.....	31
5.3.	Karakteristik Ketenagakerjaan.....	33
5.4.	Karakteristik Perumahan (Tempat Tinggal)	36
5.4.1.	Luas Lantai	36
5.4.2.	Jenis Lantai.....	37
5.4.3.	Jenis Atap.....	38
5.4.4.	Jenis Dinding	40
5.4.5.	Jenis Penerangan	41
5.4.6.	Sumber Air Minum.....	42
5.4.7.	Fasilitas Jamban.....	43
5.4.8.	Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal	44

<https://sulbarbps.go.id>

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
1	Garis Kemiskinan Menurut Komponennya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	11
2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	13
3	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	17
4	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	18
5	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	19
6	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	21
7	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	22
8	Garis Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019.....	23
9	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019	24
10	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019	25
11	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019	27
12	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019	28
13	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019	30
14	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.....	31
15	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.....	32
16	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.....	33

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
17	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.....	34
18	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.....	35
19	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Luas Lantai Per Kapita (m ²) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.....	37
20	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019	38
21	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.....	39
22	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019	40
23	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.....	41
24	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.....	43
25	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Penggunaan Fasilitas Jamban di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.....	44
26	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.....	45

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Grafik	Hal
1	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	10
2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	12
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	14
4	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan topik yang menarik untuk diperbincangkan bagi semua kalangan, baik politisi, budayawan, LSM, maupun praktisi bidang keilmuan lainnya. Persoalan kemiskinan juga merupakan problem yang mendasar bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Upaya penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan diantaranya adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya akan menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan untuk memberikan fokus perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat dipergunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan

dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data dan jumlah persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal itu bisa terwujud karena BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mencakup analisis perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat pada kondisi 2015-2019, perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019 dan perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019.

1.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyajian publikasi ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

1. Bab I. Pendahuluan berisi latar belakang, ruang lingkup, sumber data, sistematika penulisan, konsep dan definisi serta metode penghitungan kemiskinan.
2. Bab II. Perspektif kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019 meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
3. Bab III. Perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019 meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
4. Bab IV. Perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019 meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
5. Bab V. Profil Rumah Tangga Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

1.5 Konsep Dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsep Kemiskinan BPS
 - Konsep yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*)

-
-
- “Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)”
2. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
 3. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
 4. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
 5. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan
 6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
 7. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

1.6 Metode Penghitungan Kemiskinan

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), sebagai berikut :

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Teknik penghitungan GKM

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di *inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan)

P = Provinsi ke-p

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p

\overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

Dimana :

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan)

P = Provinsi ke-p

Teknik penghitungan GKNM

- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di perdesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di perdesaan.
- Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

Dimana:

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004) dan daerah j (kota/desa)

-
-
- k = Jenis komoditi non-makanan terpilih
j = Daerah (perkotaan atau perdesaan)
p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan :

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

Dimana :

$\%PM_p$ = % penduduk miskin di provinsi p

PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p

P_p = Jumlah penduduk di provinsi p

BAB II

PERSPEKTIF KEMISKINAN

DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 – 2019

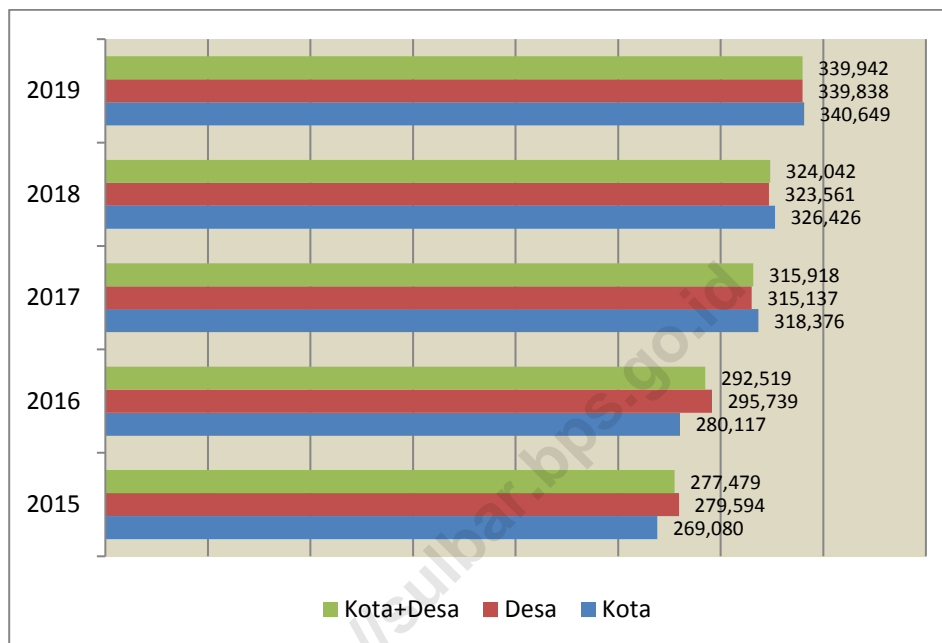
Dinamika kemiskinan dari waktu ke waktu dapat dilihat dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan tren tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2015-2019. Paparan kemiskinan ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

2.1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015-2019 menunjukkan pola yang sama baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Garis kemiskinan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yaitu Rp. 277.479,- per kapita per bulan pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 339.942,- per kapita per bulan pada tahun 2019. Dari Gambar 1 terlihat bahwa sejak tahun 2017, garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan di perdesaan, meskipun tahun 2015-2016 garis kemiskinan perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan.

Garis kemiskinan pada tahun 2019 sebesar Rp. 339.942, meningkat Rp. 15.900, dibandingkan garis kemiskinan pada tahun 2018. Peningkatan garis kemiskinan pada daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan pada daerah perkotaan. Garis kemiskinan di daerah perdesaan meningkat sebesar Rp. 16.277, dimana garis kemiskinan daerah perkotaan pada tahun 2019 sebesar Rp. 340.649 per kapita per bulan. Garis kemiskinan daerah perkotaan pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 14.223 jika dibandingkan tahun 2018, dimana garis kemiskinan daerah perdesaan tahun 2019 sebesar Rp. 339.838 per kapita per bulan. Dengan kondisi ini, penduduk yang memiliki pengeluaran Rp. 340.000 per kapita per bulan tidak dihitung sebagai penduduk miskin di daerah perdesaan, namun dihitung sebagai penduduk miskin di daerah perkotaan.

Gambar 1
Garis Kemiskinan Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2019 (Rp/Kapita/Bln)



Sumber: BPS, Susenas September 2015-2019

Apabila dilihat dari komponen pembentuk Garis Kemiskinan (makanan dan non makanan), selama kurun waktu 2015-2019, Garis Kemiskinan Makanan memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 77-79 persen, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan hanya memberikan kontribusi sekitar 20-22 persen.

Pada tahun 2015, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan paling tinggi sepanjang lima tahun terakhir. Namun, kontribusi garis kemiskinan makanan semakin lama semakin berkurang dan garis kemiskinan non makanan semakin menunjukkan perannya. Kontribusi garis kemiskinan makanan pada tahun 2019 sebesar 77,36 persen dan kontribusi garis kemiskinan non makanan sebesar 22,64 persen.

Tabel 1
Garis Kemiskinan Menurut Komponennya
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015–2019
(Rp/Kapita/Bulan)

Tahun	Makanan (GKM)		Non Makanan (GKNM)		Jumlah (GK)
	Nilai	%	Nilai	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	219.500	79,11	57.979	20,89	277.479
2016	230.960	78,96	61.558	21,04	292.519
2017	249.544	78,99	66.374	21,01	315.918
2018	251.464	77,60	72.579	22,40	324.042
2019	262.966	77,36	76.976	22,64	339.942

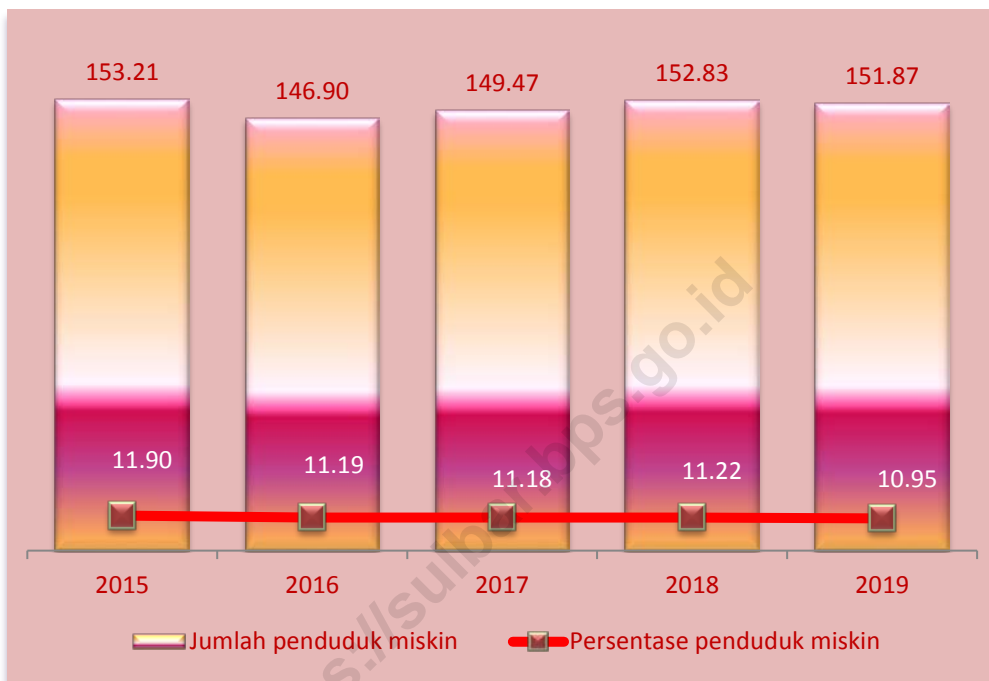
Sumber: BPS, Susenas September 2015-2019

2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin sebesar 11,90 persen, turun menjadi sebesar 11,19 persen tahun 2016. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Sulawesi Barat turun menjadi 11,18 persen dan pada tahun 2018 persentase penduduk miskin naik 11,22 persen. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin kembali turun sebesar 10,95 persen. Dalam kurun waktu 2015-2019, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,95 persen poin.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 153,21 ribu jiwa, secara absolut berkurang menjadi 146,90 ribu jiwa pada tahun 2016. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin Sulawesi Barat sebesar 149,47 ribu jiwa dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 152,83 ribu jiwa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin kembali berkurang menjadi 151,87 ribu jiwa. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, jumlah penduduk miskin mengalami perubahan fluktuatif.

Gambar 2
Jumlah (dalam ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2019



Sumber: BPS, Susenas September 2015-2019

Selama lima tahun terakhir, jumlah dan persentase penduduk miskin di perkotaan cenderung mengalami peningkatan sedangkan di perdesaan cenderung mengalami penurunan. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 di daerah perkotaan sebesar 30,82 ribu jiwa (9,41 persen) dan di daerah perdesaan sebesar 121,05 ribu jiwa (11,43 persen). Hal ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak bila dibandingkan daerah perkotaan atau mencapai 79,70 persen dari total penduduk miskin.

Tabel 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015–2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin		Persentase Penduduk Miskin	
	Kota	Desa	Kota	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	22,51	130,70	8,69	12,70
2016	25,07	121,83	8,43	12,00
2017	30,02	119,45	9,50	11,70
2018	31,45	121,38	9,80	11,66
2019	30,82	121,05	9,41	11,43

Sumber: BPS, Susenas September 2015-2019

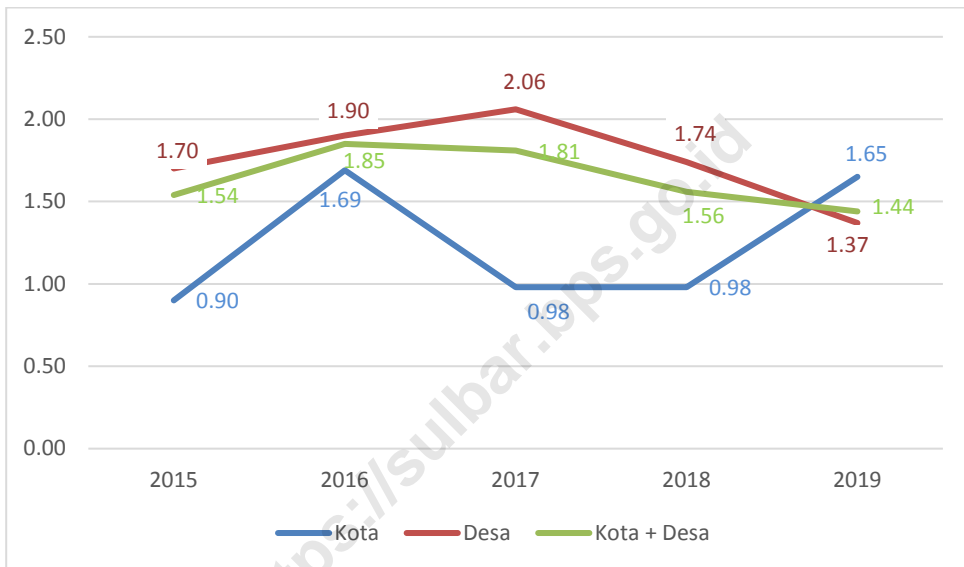
2.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Tingkat kedalaman kemiskinan selama tahun 2015-2019, angka indeks kedalaman kemiskinan berfluktuasi setiap tahunnya dan mengalami kecenderungan menurun. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 1,44, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018 dengan selisih 0,12 poin. Titik tertinggi indeks kedalaman kemiskinan terjadi pada tahun 2016 dengan nilai 1,85 dan titik terendah terjadi pada tahun 2019. Dengan demikian, secara umum, pengeluaran rata-rata penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Dengan adanya berbagai macam program pengentasan kemiskinan, diharapkan penduduk miskin dapat segera keluar dari kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan perdesaan dan perkotaan memiliki kecenderungan yang berbeda selama tiga tahun terakhir. Indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan cenderung mengalami penurunan sedangkan di daerah perkotaan cenderung meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan pada tahun 2019 sebesar 1,37, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018 dengan selisih 0,37 poin. Selama lima tahun terakhir, indeks kedalaman

kemiskinan di daerah perdesaan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 2,06 dan berada pada titik terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,37. Semakin rendahnya indeks kedalaman kemiskinan ini merupakan hal yang positif.

Gambar 3
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2019



Sumber: BPS, Susenas September 2015-2019

Indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan pada tahun 2019 sebesar 1,65, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 dengan selisih 0,67 poin. Selama lima tahun terakhir, indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan nilai 1,69 dan berada pada titik terendah pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 0,98. Semakin tingginya indeks kedalaman kemiskinan ini merupakan hal yang perlu segera diantisipasi. Pengeluaran rata-rata penduduk miskin di daerah perkotaan semakin menjauh dari garis kemiskinan.

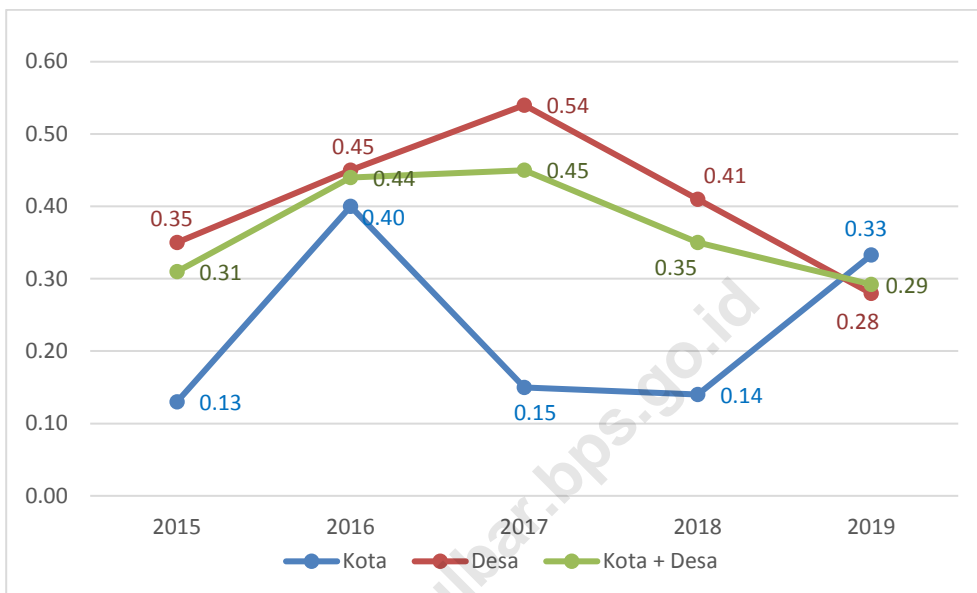
Jika dibandingkan menurut wilayah, tingkat kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan, kecuali tahun 2019. Pada tahun 2019, indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan sebesar 1,65 lebih tinggi dibanding indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan yang hanya sebesar 1,37. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan lebih tinggi di daerah perkotaan daripada di daerah perdesaan pada tahun 2019.

2.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan

Pada kurun waktu 2015-2019 terlihat bahwa tingkat keparahan kemiskinan mengalami fluktuasi yaitu sebesar dari 0,31 pada tahun 2015, bergerak fluktuatif hingga pada tahun 2019 menjadi sebesar 0,29. Titik tertinggi indeks keparahan kemiskinan Sulawesi Barat dicapai pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,45 dan titik terendah pada tahun 2019. Selama tiga tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan Sulawesi Barat cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2019 berkurang ketimpangannya.

Selama tahun 2015-2019, angka indeks keparahan kemiskinan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan cenderung berfluktuasi. Indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan mencapai titik tertinggi pada tahun 2016 dan berada pada titik terendah pada tahun 2015. Indeks keparahan kemiskinan di daerah perdesaan mencapai titik tertinggi pada tahun 2017 dan berada pada titik terendah pada tahun 2019 sebesar 0,28. Jika dibandingkan menurut wilayah, tingkat keparahan kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan, kecuali tahun 2019 perkotaan 0,33 lebih tinggi dibanding perdesaan yang hanya sebesar 0,28. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2019 di daerah perkotaan lebih timpang dibandingkan dengan distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perdesaan.

Gambar 4
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2019



Sumber: BPS, Susenas September 2015-2019

BAB III
PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 – 2019

3.1. Garis Kemiskinan Kabupaten

Garis kemiskinan pada semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2015-2019. Peningkatan terbesar garis kemiskinan pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018 terjadi di Kabupaten Majene, yaitu sebesar Rp. 10.840 per kapita perbulan. Peningkatan terendah pada periode yang sama terjadi pada Kabupaten Pasangkayu, yang meningkat sebesar Rp. 1.919 per kapita perbulan.

Tabel 3
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2019
(Rp/kapita/bulan)

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	290.568	320.726	335.248	349.522	360.362
Polewali Mandar	305.462	337.138	351.856	366.355	376.827
Mamasa	213.369	226.202	239.112	249.103	256.544
Mamuju	202.167	223.150	241.616	252.429	259.969
Pasangkayu	294.156	312.474	328.100	330.226	332.145
Mamuju Tengah	203.120	215.769	226.559	236.699	239.592

Sumber: BPS, Susenas Maret 2015-2019

Bila dibandingkan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, terlihat bahwa pada tahun 2015-2019, garis kemiskinan tertinggi setiap tahunnya berada di Kabupaten Polewali Mandar. Garis kemiskinan terendah pada tahun 2015 berada di Kabupaten Mamuju, namun sejak tahun 2016, Garis kemiskinan terendah berada di Kabupaten Mamuju Tengah.

3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten

Jumlah penduduk miskin di empat kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan selama periode 2015-2019, dimana Kabupaten Polewali Mandar turun 9,05 ribu jiwa, Kabupaten Majene turun 2,03 ribu jiwa, Kabupaten Mamasa turun 0,94 ribu jiwa, dan Kabupaten Pasangkayu 0,44 ribu jiwa. Namun dua kabupaten cenderung meningkat, dimana Kabupaten Mamuju meningkat 2,61 ribu jiwa dan Kabupaten Mamuju Tengah meningkat 0,77 ribu jiwa.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2019
(ribu jiwa)

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	25,79	24,69	23,48	23,53	23,76
Polewali Mandar	77,90	73,04	69,25	69,68	68,86
Mamasa	22,58	21,43	21,14	21,22	21,64
Mamuju	17,96	17,47	19,11	20,42	20,57
Pasangkayu	7,86	7,67	7,95	7,65	7,42
Mamuju Tengah	8,39	8,43	8,82	9,28	9,16

Sumber: BPS, Susenas Maret 2015-2019

Selama periode 2015-2019, persentase penduduk miskin di empat kabupaten cenderung mengalami penurunan. Kabupaten Polewali Mandar mengalami penurunan tertinggi, yaitu sebesar 2,62 persen poin. Tiga kabupaten lainnya yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Majene sebesar 1,86 persen poin, Kabupaten Mamasa sebesar 1,29 persen poin, dan Kabupaten Pasangkayu sebesar 0,71 persen poin.

Dibandingkan tahun 2018, persentase penduduk miskin di empat kabupaten mengalami penurunan, yaitu di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Majene. Penurunan terbesar persentase penduduk miskin pada tahun 2019 terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dari 15,97 persen pada tahun 2018 menjadi 15,60 persen pada tahun 2019 atau turun sebesar 0,37 persen poin.

Tabel 5
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2019

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	15,57	14,89	13,94	13,79	13,72
Polewali Mandar	18,22	17,06	16,05	15,97	15,60
Mamasa	14,71	13,90	13,51	13,38	13,42
Mamuju	6,70	6,48	6,88	7,18	7,06
Pasangkayu	4,99	4,82	4,84	4,53	4,28
Mamuju Tengah	6,86	6,83	6,95	7,14	6,87

Sumber: BPS, Susenas Maret 2015-2019

Kabupaten Polewali Mandar memiliki persentase penduduk miskin tertinggi jika dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Selama periode 2015-2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar mengalami penurunan setiap tahunnya, tahun 2015 sebesar 18,22 persen dan kemudian di tahun 2019 sebesar 15,60 persen atau turun sebesar 2,62 poin. Sementara itu, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa memiliki persentase penduduk miskin sekitar 13 persen. Tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah, presentase penduduk miskinnya di bawah 8 persen.

3.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten

Seiring dengan persentase penduduk miskin yang rendah di Kabupaten Pasangkayu, tingkat kedalaman kemiskinan di kabupaten tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di Kabupaten Pasangkayu relatif lebih dekat bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat.

Indeks kedalaman kemiskinan di semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan pergerakan yang fluktuatif selama tahun 2015-2019. Jika dibandingkan pada tahun 2015, indeks kedalaman kemiskinan tahun 2019 pada empat kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Tengah, mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Mamasa pada tahun 2019 mengalami perubahan tertinggi sebesar 0,63 poin jika dibandingkan kabupaten lain tahun 2015. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Mamuju 2019 mengalami peningkatan terendah sebesar 0,02 poin jika dibandingkan kabupaten lain tahun 2015.

Tabel 6
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2019

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	2,24	2,00	2,28	2,61	1,99
Polewali Mandar	2,51	2,86	2,02	3,08	3,00
Mamasa	1,56	1,86	2,19	2,24	2,19
Mamuju	0,83	0,90	0,90	0,79	0,84
Pasangkayu	0,85	0,62	0,76	0,47	0,46
Mamuju Tengah	0,98	0,83	0,44	1,00	1,37

Sumber: BPS, Susenas Maret 2015-2019

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene tahun 2019 turun dibandingkan tahun 2015. Penurunan persentase penduduk miskin yang diiringi dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan merupakan pertanda yang baik bagi program pengentasan kemiskinan pada kedua kabupaten tersebut.

3.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten

Selama periode 2015-2019, tingkat keparahan kemiskinan menunjukkan perubahan yang berfluktuatif. Tingkat keparahan kemiskinan tahun 2019 di tiga kabupaten cenderung mengalami penurunan, yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Pasangkayu jika dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, indek keparahan kemiskinan pada tiga kabupaten lainnya mengalami peningkatan

tahun 2019, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah jika di bandingkan tahun 2015.

Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2019 sebesar 0,09 dan merupakan angka terendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Kecilnya angka indeks keparahan kemiskinan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri di Kabupaten Pasangkayu relatif kecil bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Barat. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene menyusul, menempati peringkat tertinggi kedua dan ketiga. Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin tersebut, sehingga penduduk miskin tersebut dapat diangkat agar dapat segera keluar dari garis kemiskinan.

Tabel 7
Indeks Keparahhan Kemiskinan Menurut Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2019

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	0,54	0,43	0,56	0,67	0,48
Polewali Mandar	0,56	0,73	0,41	0,89	0,84
Mamasa	0,31	0,38	0,51	0,60	0,50
Mamuju	0,18	0,20	0,16	0,15	0,16
Pasangkayu	0,25	0,14	0,19	0,10	0,09
Mamuju Tengah	0,25	0,20	0,04	0,24	0,34

Sumber: BPS, Susenas Maret 2015-2019

BAB IV
PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI
DI PULAU SULAWESI TAHUN 2015 – 2019

4.1 Garis Kemiskinan Provinsi di Sulawesi

Selama periode tahun 2015-2019, garis kemiskinan provinsi di Pulau Sulawesi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Bila dibandingkan antar provinsi, peningkatan garis kemiskinan terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2015 sampai dengan 2019 yang meningkat sebesar 30,44 persen. Peningkatan garis kemiskinan terendah terjadi pada Provinsi Sulawesi Barat yang meningkat sebesar 22,51 persen.

Tabel 8
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi
Tahun 2015 – 2019 (Rp/kapita/bulan)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	307.104	318.984	336.403	356.906	379.923
Sulawesi Tengah	358.892	382.775	408.522	424.040	466.527
Sulawesi Selatan	261.854	275.361	294.358	315.738	341.555
Sulawesi Tenggara	269.516	282.161	300.258	316.729	346.466
Gorontalo	274.961	286.968	307.707	325.129	353.109
Sulawesi Barat	277.479	292.519	315.918	324.042	339.942
Indonesia	344.809	361.990	387.160	410.670	440.538

Sumber: BPS, Susenas September 2015-2019

Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan secara nasional, hanya garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah yang nilainya di atas angka nasional. Garis kemiskinan lima provinsi lainnya di bawah garis kemiskinan nasional.

4.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Sulawesi

Selama tahun 2015-2019 tampak secara umum jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi cenderung berkurang, dimana pada tahun 2015 sebesar 2.192,74 ribu jiwa, turun pada tahun 2016, naik kembali pada tahun 2017 kembali berkurang pada tahun 2018 menjadi sebesar 2.025,16 ribu jiwa. Dan Pada tahun 2019, penduduk miskin di Pulau Sulawesi sebanyak 1.988,76 ribu jiwa, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Penurunan jumlah penduduk miskin terbesar disumbang oleh Provinsi Sulawesi Selatan yang turun sebanyak 104,93 ribu jiwa dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 45,05 ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin terkecil terjadi pada Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat yang berhasil menekan jumlah penduduk miskin sehingga berkurang masing-masing sebesar 2,31 ribu jiwa dan 1,34 ribu jiwa.

Tabel 9
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2019 (ribu jiwa)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	217,15	200,35	194,85	189,05	188,60
Sulawesi Tengah	406,34	413,15	423,27	413,49	404,03
Sulawesi Selatan	864,51	796,81	825,97	779,64	759,58
Sulawesi Tenggara	345,02	327,29	313,16	301,85	299,97
Gorontalo	206,51	203,69	200,91	188,30	184,71
Sulawesi Barat	153,21	146,90	149,47	152,83	151,87
Sulawesi	2.192,73	2.088,19	2.107,63	2.025,16	1.988,76
Indonesia	28.513,57	27.764,32	26.582,99	25.674,58	24.785,87

Sumber: BPS, Susenas September 2015-2019

Jika dibandingkan tahun 2018, jumlah penduduk miskin di pulau Sulawesi berkurang. Penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, yang penduduk miskinnya berkurang 20,06 ribu jiwa. Jika dilihat secara keseluruhan di Pulau Sulawesi, jumlah penduduk miskin berkurang 36,40 ribu jiwa. Secara nasional, jumlah penduduk miskin berkurang 888,71 ribu jiwa.

Tabel 10
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2019

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	8,98	8,20	7,90	7,59	7,51
Sulawesi Tengah	14,07	14,09	14,22	13,69	13,18
Sulawesi Selatan	10,12	9,24	9,48	8,87	8,56
Sulawesi Tenggara	13,74	12,77	11,97	11,32	11,04
Gorontalo	18,16	17,63	17,14	15,83	15,31
Sulawesi Barat	11,90	11,19	11,18	11,22	10,95
Indonesia	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22

Sumber: BPS, Susenas September 2015-2019

Persentase penduduk miskin berfluktuatif pada periode 2015-2019 di Pulau Sulawesi, namun cenderung turun. Penurunan persentase penduduk miskin tertinggi pada periode 2015-2019 terjadi di Gorontalo, yaitu turun 2,85 persen poin. Sementara itu, penurunan persentase penduduk miskin Sulawesi Barat berada di urutan kedua terendah pada periode yang sama, yaitu turun 0,95 persen poin. Penurunan persentase penduduk miskin terendah berada di Sulawesi Tengah yaitu 0,89 persen poin. Secara nasional, penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1,91 persen poin. Selama lima tahun terakhir, hanya Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki persentase penduduk miskin di bawah angka kemiskinan nasional.

Persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sulawesi pada tahun 2019 terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 15,31 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,51 persen. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Barat berada pada urutan ketiga persentase penduduk miskin terendah di Pulau Sulawesi. Pada tahun 2019, hanya dua provinsi yang persentase penduduk miskinnya satu digit di depan koma, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan.

4.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Sulawesi

Tingkat kedalaman kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi pada kurun waktu lima tahun (2015-2019) cenderung fluktuatif. Tiga provinsi mengalami penurunan dan tiga provinsi lainnya mengalami peningkatan. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan terjadi pada Provinsi Sulawesi Utara yang turun sebesar 0,65 poin, kemudian Provinsi Gorontalo yang turun sebesar 0,46 poin, dan Sulawesi Barat yang turun sebesar 0,10 poin. Sementara itu, tiga provinsi yang tingkat kedalaman kemiskinannya meningkat adalah Sulawesi Tengah yang meningkat sebesar 0,82 poin, Sulawesi Tenggara meningkat sebesar 0,18 poin, dan Sulawesi Selatan meningkat sebesar 0,05 poin.

Jika dibandingkan tahun 2018, terdapat empat provinsi mengalami penurunan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2019. Penurunan tertinggi terjadi pada Provinsi Sulawesi Utara yang turun sebesar 0,42 poin dan terendah terjadi pada Provinsi Sulawesi Selatan yang turun sebesar 0,05 poin. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan indeks kedalaman kemiskinan, yaitu masing-masing meningkat sebesar sebesar 0.91 poin dan sebesar 0,14 poin.

Pada tahun 2019, Sulawesi Tengah memiliki tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi dengan nilai indeks sebesar 3,19, sedangkan Sulawesi Utara memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan terendah dengan nilai indeks sebesar 0,89. Jika dibandingkan dengan angka nasional, hanya Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat yang memiliki tingkat kedalaman kemiskinan di bawah tingkat kedalaman kemiskinan nasional.

Tabel 11
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2019

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	1,38	1,30	1,30	1,31	0,89
Sulawesi Tengah	2,28	2,80	2,80	2,28	3,19
Sulawesi Selatan	1,53	1,92	1,92	1,68	1,63
Sulawesi Tenggara	1,98	2,09	2,09	2,09	2,23
Gorontalo	2,79	3,31	3,31	3,02	2,61
Sulawesi Barat	1,85	1,81	1,81	1,31	1,44
Indonesia	1,74	1,79	1,79	1,63	1,50

Sumber: BPS, Susenas September 2015-2019

4.4 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi di Sulawesi

Secara umum, tingkat keparahan kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi cenderung menurun pada periode tahun 2015-2019. Sebanyak empat provinsi mengalami penurunan dan dua provinsi mengalami peningkatan, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penurunan terbesar terdapat pada Provinsi Gorontalo yang turun sebesar 0,31 poin dan terendah di Sulawesi Barat yang turun sebesar 0,01 poin.

Pada tahun 2019, Sulawesi Tengah memiliki tingkat keparahan kemiskinan tertinggi dengan nilai indeks sebesar 1,15, sedangkan Provinsi Sulawesi Utara memiliki nilai indeks keparahan kemiskinan terendah sebesar 0,17. Jika dibandingkan dengan angka nasional, hanya Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat yang memiliki tingkat keparahan kemiskinan di bawah tingkat keparahan kemiskinan nasional.

Tabel 12
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2019

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	0,44	0,34	0,30	0,30	0,17
Sulawesi Tengah	0,60	0,56	0,78	0,68	1,15
Sulawesi Selatan	0,45	0,38	0,50	0,51	0,43
Sulawesi Tenggara	0,49	0,46	0,52	0,55	0,59
Gorontalo	0,88	0,65	0,85	0,83	0,56
Sulawesi Barat	0,31	0,44	0,45	0,35	0,29
Indonesia	0,51	0,44	0,46	0,41	0,36

Sumber: BPS, Susenas 2014 dan September 2015-2018

BAB V PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019

5.1. Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga dan rata-rata umur kepala rumah tangga. Ketiga karakteristik sosial demografi tersebut dibandingkan dengan melihat rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin dan tidak miskin.

Rumah tangga miskin cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak karena rumah tangga miskin diduga cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. Secara umum, terlihat bahwa pada tahun 2019 rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin lebih banyak dibanding rumah tangga tidak miskin. Akan tetapi, di sisi lain tingkat kematian anak pada rumah tangga miskin juga relatif tinggi akibat kurangnya pendapatan dan minimnya akses kesehatan serta pemenuhan gizi anak. Dari tabel 13 terlihat bahwa di daerah perkotaan maupun perdesaan, pada tahun 2019 rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin lebih banyak dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat kelahiran tinggi, tetapi kurang didukung oleh pendapatan serta akses kesehatan dan gizi.

Isu mengenai kesetaraan gender semakin merebak khususnya dengan adanya kemajuan pembangunan dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Peran wanita sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga bukanlah hal yang mudah. Di Provinsi Sulawesi Barat, sebesar 12,23 persen wanita sebagai kepala rumah tangga miskin dan 14,36 persen wanita sebagai kepala rumah tangga tidak miskin. Hal ini mengindikasikan kecenderungan wanita tidak miskin untuk berperan ganda dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah dan ibu yang harus melahirkan, merawat dan

membesarkan anak-anaknya. Kondisi ini merupakan cerminan secara umum di Provinsi Sulawesi Barat baik di Perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Tabel 13
Karakteristik Sosial Demografi
Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga :		
- Perkotaan (K)	5,42	4,14
- Perdesaan (D)	4,99	4,00
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	5,07	4,04
2. Persentase wanita sebagai kepala rumah tangga :		
- Perkotaan (K)	13,67	16,68
- Perdesaan (D)	11,89	13,65
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	12,23	14,36
3. Rata-rata umur kepala rumah tangga :		
- Perkotaan (K)	45,01	47,25
- Perdesaan (D)	45,53	46,26
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	45,43	46,50

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Rata-rata umur kepala rumah tangga digunakan untuk melihat produktifitas kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Rata-rata umur kepala rumah tangga pada rumah tangga tidak miskin lebih tinggi dari rumah tangga miskin, yaitu sebesar 46,50 tahun sementara pada rumah tangga miskin 45,43 tahun pada rumah tangga miskin.

Tabel 14
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin :		
- Perkotaan (K)	86,33	13,67
- Perdesaan (D)	88,11	11,89
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	87,77	12,23
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :		
- Perkotaan (K)	83,32	16,68
- Perdesaan (D)	86,35	13,65
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	85,64	14,36

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

5.2. Karakteristik Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan seseorang akan berkorelasi dengan taraf kehidupannya. Seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga pendapatan yang diperoleh akan lebih baik.

Persentase kepala rumah tangga miskin yang buta huruf (tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya) lebih banyak bila dibandingkan kepala rumah tangga tidak miskin. Persentase kepala rumah tangga miskin yang buta huruf sebesar 14,11 persen sedangkan kepala rumah tangga tidak miskin yang buta huruf sebesar 8,59 persen.

Tabel 15
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat Membaca dan Menulis
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin :		
- Perkotaan (K)	95,96	4,04
- Perdesaan (D)	83,47	16,53
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	85,89	14,11
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :		
- Perkotaan (K)	93,57	6,43
- Perdesaan (D)	90,76	9,24
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	91,41	8,59

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 16 menunjukkan bahwa persentase kepala rumah tangga (KRT) yang tidak tamat SD dan tamat SD untuk rumah tangga miskin lebih tinggi bila dibanding rumah tangga tidak miskin. Sementara itu untuk pendidikan yang lebih tinggi yaitu SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, persentase kepala rumah tangga miskin dengan tingkat pendidikan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa KRT yang tergolong miskin cenderung berpendidikan rendah.

Tabel 16
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA & PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	20,85	48,86	18,88	11,41
- Perdesaan (D)	42,03	28,48	16,23	13,27
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	37,93	32,42	16,74	12,91
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	21,46	15,81	16,08	46,64
- Perdesaan (D)	27,62	33,93	12,06	26,38
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	26,18	29,69	13,00	31,13

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

5.3. Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama kepala rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan dan menggambarkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga.

Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin diantaranya lapangan usaha yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Stigma orang miskin seringkali identik dengan bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan.

Tabel 17
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tidak Bekerja	Pertanian	Industri	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	6,01	50,79	2,10	41,10
- Perdesaan (D)	11,25	72,99	3,12	12,64
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	10,24	68,69	2,93	18,14
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	15,12	19,66	6,05	57,17
- Perdesaan (D)	8,31	58,65	4,92	28,12
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	9,91	49,52	5,18	35,39

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Sumber penghasilan utama rumah tangga di Provinsi Sulawesi Barat sebagian besar berasal dari sektor pertanian baik rumah tangga miskin maupun tidak miskin. Provinsi Sulawesi Barat memiliki komoditi unggulan yaitu kakao, kelapa sawit, kelapa dalam, dan kopi. Meskipun sebagian besar rumah tangga tidak miskin memiliki sumber penghasilan utama rumah tangga adalah sektor pertanian, namun di daerah perkotaan lebih didominasi oleh sektor lainnya seperti sektor jasa, perdagangan, dan transportasi.

Persentase kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja lebih banyak bila dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa susahnyanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bagi rumah tangga miskin terlebih ketika kepala rumah tangga tersebut tidak bekerja. Berbeda halnya dengan rumah tangga tidak miskin, yang masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun tidak bekerja.

Tabel 18
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tidak Bekerja	1-2	3	4-5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Rumah Tangga Miskin :					
- Perkotaan (K)	6,01	68,02	0,00	25,97	0,00
- Perdesaan (D)	11,25	68,25	1,60	17,85	1,05
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	10,24	68,21	1,29	19,42	0,85
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :					
- Perkotaan (K)	15,12	38,87	3,63	41,11	1,27
- Perdesaan (D)	8,31	59,92	2,83	28,30	0,64
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	9,91	54,99	3,02	31,30	0,79

Keterangan :

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas
6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga diantaranya status pekerjaan yang disandang Kepala Rumah Tangga. Ada indikasi bahwa mereka yang berstatus pengusaha akan memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan yang hanya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Dari Tabel 18 terlihat bahwa pada rumah tangga miskin, terutama di perkotaan, hampir tidak ada yang berstatus sebagai pengusaha (berusaha dibantu buruh tetap/dibayar). Sedangkan pada rumah tangga tidak miskin, status pengusaha lebih banyak di daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga tidak miskin lebih baik dari rumah tangga miskin.

Pada rumah tangga miskin, sebagian besar kepala rumah tangga berstatus berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yaitu 68,21 persen. Begitu pula halnya pada rumah tangga tidak miskin, mayoritas kepala rumah tangga berstatus berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yaitu 54,99 persen.

5.4. Karakteristik Perumahan (Tempat Tinggal)

5.4.1. Luas Lantai

Indikator perumahan dapat menjadi salah satu determinan penting tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah per kapita (m^2). Menurut Departemen Kesehatan (2002), salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapita minimal 8 m^2 .

Tabel 19 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin memiliki luas lantai per kapita 8-15 m^2 baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sementara untuk luas lantai per kapita > 15 m^2 hanya sebagian kecil dimiliki oleh

rumah tangga miskin baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Berbeda halnya dengan rumah tangga tidak miskin dimana sebagian besar rumah tangga memiliki luas lantai > 15 m². Hal ini menggambarkan bahwa pada rumah tangga miskin masih banyak rumah yang belum memenuhi standar kesehatan.

Tabel 19
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Luas Lantai Per Kapita (m²) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	< 8	8 -15	>15
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	28,20	48,34	23,46
- Perdesaan (D)7d	38,36	44,73	16,91
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	36,39	45,43	18,18
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	12,12	27,51	60,37
- Perdesaan (D)	12,12	35,63	52,25
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	12,12	33,73	54,15

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

5.4.2. Jenis Lantai

Pola distribusi rumah tangga menurut jenis lantai terluas relatif sama baik rumah tangga miskin maupun tidak miskin. Sebagian besar rumah tangga tersebut menggunakan lantai terluas bukan tanah. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jenis lantai terluas bukan tanah sebesar 91,96 persen sedangkan pada rumah tangga tidak miskin sebesar 97,95.

Pola tersebut pun tergambar pada rumah tangga di daerah perkotaan maupun perdesaan. Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan lantai bukan tanah sudah relatif sedikit. Meskipun demikian, pada rumah tangga miskin di daerah perdesaan masih ada sekitar 9,36 persen rumah tangga yang menggunakan lantai tanah.

Tabel 20
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah	Bukan Tanah	Tanah
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin :		
- Perkotaan (K)	97,45	2,55
- Perdesaan (D)	90,64	9,36
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	91,96	8,04
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :		
- Perkotaan (K)	99,29	0,71
- Perdesaan (D)	97,54	2,46
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	97,95	2,05

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

5.4.3. Jenis Atap

Pemilihan jenis atap dengan kualitas tertentu menunjukkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Pemakaian jenis atap beton, genteng dan sirap oleh masyarakat Sulawesi Barat relatif sedikit bahkan untuk rumah tangga miskin sebesar 0,33 persen yang menggunakan jenis atap tersebut. Masyarakat lebih banyak menggunakan jenis atap seng/asbes baik pada

rumah tangga miskin maupun tidak miskin yaitu masing-masing sebesar 87,83 persen dan 94,07 persen. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena untuk mendapatkan genteng relatif sulit dan mahal, sehingga faktor ekonomis menjadi suatu pilihan.

Tabel 21
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Beton/ Sirap /Genteng	Seng/ Asbes	Ijuk/ Rumbia	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin:				
- Perkotaan (K)	0,00	85,71	12,26	2,03
- Perdesaan (D)	0,41	88,34	11,25	0,00
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	0,33	87,83	11,45	0,39
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:				
- Perkotaan (K)	3,79	93,18	2,88	0,15
- Perdesaan (D)	1,40	94,35	3,78	0,47
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	1,96	94,07	3,57	0,40

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Selain pemakaian jenis atap seng/asbes pada rumah tangga miskin, ijuk/rumbia juga merupakan jenis atap yang masih banyak digunakan oleh rumah tangga miskin yaitu sebesar 11,45 persen. Bahkan, sebesar 9,15 persen rumah tangga miskin di daerah perkotaan menggunakan jenis atap ijuk/rumbia. Penggunaan ijuk/rumbia yang masih cukup besar pada rumah tangga miskin dapat menjadi salah satu parameter penentuan rumah tangga miskin.

5.4.4. Jenis Dinding

Berdasarkan jenis dinding terluas, sebagian besar rumah tangga tidak miskin menggunakan dinding tembok sedangkan rumah tangga miskin menggunakan dinding kayu. Meskipun demikian, sebanyak 43,08 persen rumah tangga tidak miskin juga menggunakan kayu sebagai dinding rumahnya. Hal ini terkait dengan sosio-kultural masyarakat setempat yang masih cenderung menggunakan kayu sebagai jenis dinding terluas.

Tabel 22
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	32,26	52,00	1,55	14,19
- Perdesaan (D)	16,02	74,56	4,00	5,43
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	19,16	70,19	3,53	7,12
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	67,54	26,37	1,47	4,63
- Perdesaan (D)	46,02	48,20	2,28	3,50
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	51,06	43,08	2,09	3,77

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

5.4.5. Sumber Penerangan

Sumber penerangan bagi sebagian besar rumah tangga miskin menggunakan listrik baik listrik PLN maupun non PLN. Pada rumah tangga miskin di daerah perkotaan sebesar 97,76 persen sudah menggunakan listrik PLN, namun di daerah perdesaan masih ada sebagian kecil yang menggunakan non listrik sebagai sumber penerangannya, yaitu sebesar 6,12 persen.

Tabel 23
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Non Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	97,76	2,24	0,00
- Perdesaan (D)	60,96	32,92	6,12
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	68,08	26,98	4,94
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	98,66	0,95	0,39
- Perdesaan (D)	82,75	15,17	2,08
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	86,48	11,84	1,68

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Pola distribusi pemakaian listrik pada rumah tangga tidak miskin juga cenderung sama dengan rumah tangga miskin, dimana sebagian besar rumah tangga menggunakan listrik PLN. Dari tabel 23 terlihat bahwa di daerah perkotaan masih ada rumah tangga tidak miskin menggunakan non listrik sebagai sumber

penerangannya, yaitu sebesar 0,39 persen. Sementara itu untuk di daerah perdesaan, sumber penerangan yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga tidak miskin adalah listrik PLN, yaitu sebesar 82,75 persen.

Pemakaian non listrik pada rumah tangga miskin yaitu sebesar 4,94 persen dan didominasi oleh rumah tangga di daerah perdesaan. Persentase tersebut lebih besar bila dibandingkan rumah tangga tidak miskin yang hanya sebesar 1,68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian non listrik seperti petromak, lentera dan lainnya masih menjadi pilihan oleh rumah tangga miskin yang secara ekonomis lebih terjangkau.

5.4.6. Sumber Air Minum

Indikator perumahan lain yang dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah adalah ketersediaan fasilitas akses air minum yang berkualitas sebagai sumber air minum untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Penggunaan air layak pada rumah tangga miskin sebesar 60,65 persen lebih banyak bila dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin yang sebesar 33,26 persen. Baik pada rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin di daerah perkotaan lebih dari 50 persen rumah tangga menggunakan air tidak layak.

Tabel 24
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah	Air Layak	Air Tidak Layak
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin:		
- Perkotaan (K)	47,50	52,50
- Perdesaan (D)	63,80	36,20
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	60,65	39,35
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:		
- Perkotaan (K)	15,73	84,27
- Perdesaan (D)	38,62	61,38
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	33,26	66,74

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

5.4.7. Fasilitas Jamban

Fasilitas lain yang harus dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam mendukung pola hidup sehat adalah ketersediaan jamban. Selain ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting yang dapat dibedakan atas jamban sendiri, bersama dan umum/tidak ada.

Pada rumah tangga miskin sebagian sebagian besar (51,18 persen) rumah tangga menggunakan fasilitas jamban umum atau tidak mempunyai jamban, sedangkan pada rumah tangga tidak miskin sebagian besar (70,27 persen) rumah tangga memiliki jamban sendiri. Fenomena ini terjadi baik di daerah perdesaan

maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin belum memiliki pemahaman kesehatan yang memadai dan tidak menutup kemungkinan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebabnya.

Tabel 25
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Penggunaan Fasilitas Jamban
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Sendiri	Bersama	Umum/ Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	45,61	6,39	48,00
- Perdesaan (D)	35,86	12,19	51,94
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	37,75	11,07	51,18
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	81,06	8,94	10,00
- Perdesaan (D)	66,97	11,27	21,77
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	70,27	10,72	19,01

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

5.4.8. Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal

Status pemilikan rumah dibedakan atas rumah sendiri, kontrak/sewa dan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa dan lain-lain). Distribusi persentase pemilikan rumah relatif sama baik rumah tangga miskin maupun tidak miskin. Sebagian besar rumah tangga menempati rumah sendiri yaitu 93,63 persen pada rumah tangga miskin dan 86,12 persen pada rumah tangga tidak miskin. Rumah

tangga dengan status kepemilikan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa dan lain-lain) sebesar 6,05 persen pada rumah tangga miskin dan 11,53 pada rumah tangga tidak miskin. Sementara itu, rumah tangga yang menempati rumah dengan status kontrak/sewa merupakan yang paling sedikit dimana pada rumah tangga miskin 0,32 persen dan rumah tangga tidak miskin hanya 2,35 persen.

Tabel 26
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Sendiri	Kontrak/ Sewa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	95,64	1,67	2,68
- Perdesaan (D)	93,14	0,00	6,86
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	93,63	0,32	6,05
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	80,03	6,00	13,98
- Perdesaan (D)	87,99	1,23	10,78
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	86,12	2,35	11,53

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Pada rumah tangga miskin, tidak ada rumah tangga yang menempati rumah dengan status kontrak/sewa di daerah pedesaan bahkan daerah perkotaan hanya 1,67 persen. Status kepemilikan rumah belum begitu mengindikasikan suatu rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin berusaha untuk memiliki rumah dengan fasilitas perumahan seadanya tanpa memperhatikan standar rumah sehat dan layak huni. Sementara itu, rumah tangga tidak miskin di daerah perkotaan yang

menempati rumah dengan status kontrak/sewa di daerah perkotaan sebesar 6,00 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 1,23 persen. Hal ini menunjukkan kemampuan ekonomi rumah tangga tidak miskin untuk menyewa rumah dengan standar yang mereka inginkan.

<https://sulbar.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Tlp. (0426) 22103 Fax. (0426) 21265

Jl. RE. Martadinata No 10 Mamuju

Email: sulbar@bps.go.id

Homepage: <http://sulbar.bps.go.id>

ISSN 2655-0326



9 772655 032606 >